BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2022.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2022. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melaksankan perubahan RKPD Tahun 2022, yaitu:

- 1. Penyesuaiaan target kinerja program dan kegiatan serta realokasi anggaran dan refocusing pada kegiatan;
- 2. Penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah;
- 3. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 4. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2022;
- 5. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan alokasi pelaksanaan kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;

- 6. Penambahan/pengurangan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 1-2 keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
- 7. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan;
- 8. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah menyebabkan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi struktur organisasi baru;
- 9. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan III Tahun 2022.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilaklukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- b. Perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- c. Penetapan.

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun yang sama.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubagan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Darah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 54);
- 19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisinsi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah untuk:

- 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Parsial III Tahun 2022;
- 2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- 3. Mengukur kinerja penyelenggaraan melalui capaian target program dan kegiatan pembangunan;
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, landasan hukum pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan,

maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN

Memuat kajian (Review) terhadap hasil ecvaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan sampai Triwulan III, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (Tabel Evaluasi Triwulan III)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Rioritas Pembangunan dan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatoif pada perubahan dan disajikan dalam Tab Matrik

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN DINAS PERHUBUNGAN

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan di tdalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicapai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Thun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta juga harus dilaksanakan evaluasi. Karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada Januari 2022, oleh karena itu yang disajiakn merupakan perkiraan realisai tahun 2022 Triwulan III sebagaiman tersebut dalam T-C29 terlampir:

Tabel 2.1 TC.-29
EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

| | | ŀ | ODE | | | PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE | INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA) | APBD | PARSIAL | (sesuai DPA) | REALISA | ASI TRIW 20 | ULAN III TAHUN 22 | SELISIH | I | CATATA N PERMAS |
|---|----|----|-----|----|----|---|---|------------|------------|----------------|---------|----------------|----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | GIATAN | · | Lokasi | Targ et | Pagu Indikatif | Lokasi | Targ et | Pagu | Pagu | % | ALAHAN |
| | | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= (6-9 |) | 11 |
| 2 | 15 | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 20.630.625.498 | PWK | | 14.260.730.314 | 6.369.895.184 | 30,88% | |
| 2 | 15 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG U KABUPATEN/KOTA | RUSAN PEMERINTAHAN DAER | АН | | 18.060.312.818 | PWK | | 12.380.377.114 | 5.679.935.704 | 31.45% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggar | an dan Evaluasi Kinerja Perang | kat Daerah | | 29.759.900 | PWK | | 15.101.600 | 14.658.300 | 49,26% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun | PWK | 1 Dok | 10.068.600 | PWK | 1 Dok | 7.308.600 | 2.760.000 | 25,82% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen yang disusun | PWK | 1 Dok | 10.553.000 | PWK | 1 Dok | 7.793.000 | 2.760.000 | 26,153% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Keuangan | Jumlah dokumen yang | PWK | 1 | 9.138.300 | PWK | 1 | - | 9.138.300 | 0% | |
| | | | | | | Perangakat Daerah | disusun | | Dok | | | Dok | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Pe | rangkat Daerah | | | 10.790.426.753 | PWK | | 7.369.220.311 | 3.421.206.442 | 31,71% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN | PWK | 14 bln | 10.780.325.153 | PWK | 1 Dok | 7.362.798.711 | 3.417.526.442 | 31,70% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia | PWK | 1 Dok | 10.101.600 | PWK | 1 Dok | 6.421.600 | 3.680.000 | 36,43% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik | Daerah pada Perangkat Daera | h | | 10.450.950 | PWK | | • | 10.450.950 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | PWK | 1 Dok | 10.450.950 | PWK | 1 Dok | - | 10.450.950 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 04 | | Administrasi Pendapatan I | Daerah Kewenangan Perangka | t Daerah | | 125.000.000 | PWK | | - | 125.000.000 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi | Jumlah Dokumen Kebijakan Retribusi | PWK | 1 Dok | 125.000.000 | PWK | 1 Dok | - | 125.000.000 | 0% | |

| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--------------------------|------------------------------|-------------|------|---------------|-----|------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | Daerah serta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Kebijakan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Retribusi Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian | Perangkat Daerah | | | 74.850.000 | PWK | | 25.000.000 | 49.850.000 | 66.60% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | 01 | Peningkatan Sarana dan | Jumlah peningkatan | PWK | Keg | 25.000.000 | PWK | Keg | 25.000.000 | - | 100% | |
| | | | | | | Prasarana Disiplin | sarana dan prasarana | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pegawai | disiplin pegawai | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | 04 | Koordinasi dan | Jumlah kegiatan | PWK | Pake | 14.850.000 | PWK | Pake | - | 14.850.000 | 0% | |
| | | | | | | Pelaksanaan Sistem | Koordinasi dan | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Informasi Kepegawaian | Pelaksanaan Sistem | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pakaian Dinas | PWK | Pake | 35.000.000 | PWK | Pake | - | 35.000.000 | 0% | |
| | | | | | | Pegawai Berdasarkan | Beserta Atribut | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Tugas dan Fungsi | Kelengkapan tersedia | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Peran | gkat Daerah | | | 1.218.767.239 | PWK | | 694.176.016 | 524.591.223 | 43,04% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen | Tersedianya komponen | PWK | Pake | 52.140.450 | PWK | Pake | 37.842.350 | 14.298.100 | 27,42% | |
| | | | | | | Instalasi | instalasi listrik | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Listrik/Penerangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan | Tersedianya peralatan dan | PWK | Pake | 148.900.000 | PWK | Pake | 147.900.000 | 1.000.000 | 0,007% | |
| | | | | | | dan Perlengkapan Kantor | perlengkapan kantor | | t | | | t | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan | Tersedianya peralatan | PWK | Pake | 50.969.450 | PWK | Pake | 26.849.200 | 24.120.250 | 47,32% | |
| | | | | | | Rumah Tangga | rumah tangga | | t | | | t | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan | Tersedianya bahan logistik | PWK | Pake | 480.398.419 | PWK | Pake | 358.709.038 | 121.689.381 | 25,33% | |
| | | | | | | Logistik Kantor | | | t | | | t | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang | Tersedianya bahan | PWK | Pake | 100.000.000 | PWK | Pake | 67.230.000 | 32.770.000 | 32,78% | |
| | | | | | | Cetakan dan | cetakan pengandaan | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Penggandaan | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan | Penyediaan Bahan Bacaan | PWK | Pake | 24.989.720 | PWK | Pake | - | 24.989.720 | 0% | |
| | | | | | | Bacaan dan Peraturan | dan Peraturan Perundang- | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Perundang-undangan | undangan | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat | Rapat-rapat koordinasi | PWK | Pake | 161.374.000 | PWK | Pake | 55.645.428 | 105.728.572 | 65,52% | |
| | | | | | | Koordinasi dan | dan keluar daerah | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan | Jumlah menu/fitur sistem | PWK | Pake | 200.000.200 | PWK | Pake | - | 200.000.200 | 0% | |
| | | | | | | Sistem Pemerintahan | | | t | | | t | | | | |
| | | | | | | Berbasis Elektronik pada | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SKPD | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 07 | | | aerah Penunjang Urusan Perar | ngkat Daera | h | 387.795.000 | PWK | | 387.120.000 | 675.000 | 0,17% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan | Tersedianya peralatan dan | PWK | Pake | 387.795.000 | PWK | Pake | 387.120.000 | 675.000 | 0,17% | |
| | | | | | | Mesin Lainnya | mesin lainnya | | t | | | t | | | | |

| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | | Denvedican Iasa Denunian | g Urusan Pemerintahan Daera | h | | 5.041.212.976 | PWK | 1 1 | 3.678.033.187 | 1.363.179.789 | 27,04% | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|------------|------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----------|--|
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat | Tersedianya jasa surat | PWK | Lem | 2.000.000 | PWK | 200 | 2.000.000 | | 100% | |
| | 13 | 01 | _ | 00 | 01 | Menyurat | menyurat | IVVIX | bar | 2.000.000 | TVVIX | Ibr | 2.000.000 | _ | 100% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa | Tersedianya jasa | PWK | Bula | 127.305.000 | PWK | 3 | 93.258.061 | 34.046.939 | 26,74% | |
| - | 13 | "- | _ | | 02 | Komunikasi, Sumber | komunikasi, sumber daya | | n | 127.303.000 | | Bula | 33.230.001 | 31.010.333 | 20,7 170 | |
| | | | | | | Daya Air dan Listrik | air dan listrik | | | | | n | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa | Gaji tenaga harian lepas, | PWK | Bula | 4.911.907.979 | PWK | 3 | 3.582.775.126 | 1.329.132.850 | 27,60% | |
| - | 13 | "- | _ | | 01 | Pelayanan Umum Kantor | PTT, penjaga malam, | | n | 1.511.507.575 | | Bula | 3.302.773.120 | 1.525.152.650 | 27,0070 | |
| | | | | | | l ciayanan emam name. | pembantu penguji dan | | | | | n | | | | |
| | | | | | | | premi asuransi | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milil | Daerah Penunjang Urusan Pe | merintahan | | 382.050.000 | PWK | | 211.726.000 | 170.324.000 | 0,004% | |
| | | | | | | Daerah | , , | | | | | | | | • | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa | Jumlah jasa pemeliharaan, | PWK | Pake | 91.500.000 | PWK | 2 | 52.743.400 | 38.756.600 | 42.36% | |
| | | | | | | Pemeliharaan, Biaya | biaya pemeliharaan dan | | t | | | unit | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan dan Pajak | pajak kendaraan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kendaraan Perorangan | perorangan dinas atau | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dinas atau Kendaraan | dinas jabatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa | Tersedianya jasa | PWK | Pake | 237.800.000 | PWK | 3 | 133.782.600 | 104.017.400 | 43,74% | |
| | | | | | | Pemeliharaan, Biaya | pemeliharaan, biaya | | t | | | unit | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan, Pajak dan | pemeliharaan, pajak dan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Perizinan Kendaraan | perizinan kendaraan dinas | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dinas Operasional atau | operasional atau lapangan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Lapangan | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan | Terpeliharanya peralatan | PWK | Pake | 52.750.000 | PWK | 3 | 25.200.000 | 27.550.000 | 52,13% | |
| | | | | | | dan Mesin Lainnya | dan mesin lainnya | | t | | | bula | | | | |
| | | | | | | | | | | | | n | | | | |
| 2 | 15 | 02 | _ | | | | RAAN LALU LINTAS DAN ANGK | |) | 2.470.311.480 | PWK | | 1.845.102.000 | 625.209.480 | 25,31% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | 02 | , | Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | D | 489.166.750 | PWK | D | 416.796.100 | 72.370.650 | 14,80% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan | Tersedianya perlengkapan | PWK | Pers | 382.667.750 | PWK | Pers | 310.414.600 | 72.253.150 | 18,90% | |
| | | | | | | Perlengkapan Jalan di | jalan di jalan | | en | | | en | | | | |
| - | 15 | 02 | - | 02 | 04 | Jalan Kabupaten/Kota Rehabillitasi dan | kabupaten/kota | DIAM | Dore | 106 400 000 | DIAW | Dore | 106.381.500 | 117.500 | 0.110/ | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | 04 | Renabilitasi dan Pemeliharaan | Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan | PWK | Pers | 106.499.000 | PWK | Pers | 106.381.500 | 117.500 | 0,11% | |
| | | | | | | Perlengkapan Jalan | perlengkapan jalan | | en | | | en | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 03 | | Periengkapan Jaian Pengelola Terminal Penum | | l | I | 93.695.650 | PWK | | 93.555.650 | 140.000 | 0,15% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 03 | 05 | Peningkatan Kapasitas | Jumlah perserta | PWK | Pers | 93.695.650 | PWK | Pers | 93.555.650 | 140.000 | 0,15% | |
| - | 13 | 02 | _ | | 03 | SDM Pengelola Terminal | peningkatan kapasitas | 1 441 | en | 55.055.050 | 1 4417 | en | 55.555.050 | 140.000 | 0,13/0 | |
| | | | | | | Tipe C | SDM pengelola terminal | | | | | Cii | | | | |
| | | | | | | Tipe C | Tipe C | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | | Penerbitan Izin Penyele | nggaraan dan Pembangun | an Fasilitas | Parkir | 130.030.100 | PWK | | 94.961.250 | 35.068.850 | 27,00% | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|---------------|------------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|--------|--|
| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | 01 | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik | Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor tersedia | PWK | Pers en | 54.999.350 | PWK | Pers en | 54.766.200 | 233.150 | 0,42% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor | PWK | Pers en | 75.030.750 | PWK | Pers en | 40.195.050 | 34.835.700 | 46,42% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | | Pengujian Berkala Kendara | an Bermotor | | | 555.999.350 | PWK | | 282.378.650 | 273.620.700 | 49,21% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan uji KIR | PWK | Unit | 260.095.950 | PWK | Unit | 84.878.650 | 175.217.300 | 67,37% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | 04 | Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | PWK | Pake t | 200.823.650 | PWK | Pake t | 197.500.000 | 3.323.650 | 1,66% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terpeliharanya alat uji kendaraan | PWK | Unit | 95.079.750 | PWK | Unit | - | 95.079.750 | 0% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | | Pelaksanaan Manajemen o Kabupaten/Kota | lan Rekayasa Lalu Lintas untul | (Jaringan Ja | lan | 896.485.950 | PWK | | 843.392.650 | 53.093.300 | 5,92% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | PWK | Kegi | 50.020.400 | PWK | Keg | 50.020.400 | - | 100% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan | PWK | Kegi a | 796.512.250 | PWK | Keg | 793.372.250 | 3.140.000 | 0,40% | |

| | | | 1 | | | | T | T | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-------------|-----|-----|------------|------------|--------|--|
| | | | | | | | kabupaten/kota | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan | Jumlah kegiatan forum lalu | PWK | Keg | 49.953.300 | PWK | Keg | - | 49.953.300 | 0% | |
| | | | | | | Angkutan Jalan | lintas dan angkutan jalan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota | kabupaten/kota | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | | Persetujuan Hasil Analisa | Dampak Lalu Lintas (Andalalin |) untuk Jalan | 1 | 99.999.600 | PWK | | 44.719.600 | 55.280.000 | 55,28% | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | 03 | Koordinasi dan | Jumlah Penerbitan | PWK | Keg | 56.933.200 | PWK | Keg | 17.403.200 | 39.530.000 | 69,43% | |
| | | | | | | Sinkronisasi Penilaian | Rekomendasi Andalalin | | | | | | | | | |
| | | | | | | Hasil Andalalin | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan | Jumlah Kegiatan | PWK | Keg | 43.066.400 | PWK | Keg | 27.316.400 | 15.750.000 | 36,46% | |
| | | | | | | Rekomendasi Andalalin | Pengawasan Pelaksanaan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rekomendasi Andalalin | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 08 | | Audit dan Inspeksi Keselai | natan LLAJ di Jalan | | | 74.996.120 | PWK | | 13.777.500 | 61.218.620 | 81,83% | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 80 | 02 | Pelaksanaan Inspeksi, | Jumlah kegiatan | PWK | Keg | 24.992.000 | PWK | Keg | - | 24.992.000 | 0% | |
| | | | | | | Audit dan Pemantauan | Pelaksanaan Inspeksi, | | | | | | | | | |
| | | | | | | Unit Pelaksana Uji | Audit dan Pemantauan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Berkala Kendaraan | Unit Pelaksana Uji Berkala | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bermotor | Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 80 | 03 | Pelaksanan Inspeksi, | Jumlah Kegiatan | PWK | Keg | 25.019.400 | PWK | Keg | 13.777.500 | 11.241.900 | 44,93% | |
| | | | | | | Audit dan Pemantauan | Pelaksanan Inspeksi, Audit | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terminal | dan Pemantauan Terminal | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 80 | 05 | Pelaksanaan Inspeksi, | Jumlah Kegiatan | PWK | Kegi | 24.984.720 | PWK | Keg | - | 24.984.720 | 0% | |
| | | | | | | Audit dan Pemantauan | Pelaksanaan Inspeksi, | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sistem Manajemen | Audit dan Pemantauan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Keselamatan Perusahaan | Sistem Manajemen | | | | | | | | | |
| | | | | | | Umum | Keselamatan Perusahaan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Umum | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | | | um untuk Jasa Angkutan Oran | g dan/atau E | Barang | 100.030.600 | PWK | | 55.520.600 | 44.510.000 | 44,50% | |
| | | | | | | Antar Kota dalam 1 (satu) | Daerah Kabupaten/Kota | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Angkutan | Program simaskot | PWK | Keg | 25.030.600 | PWK | Keg | 24.900.600 | 130.000 | 0,52% | |
| | | | | | | Umum untuk Jasa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Angkutan Orang | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan/atau Barang Antar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kota dalam 1 (satu) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | 02 | Pengendalian dan | Rasio fasilitas penerbitan | PWK | Keg | 75.000.000 | PWK | Keg | 30.620.000 | 44.380.000 | 59,17% | |
| | | | | | | Pengawasan | izin trayek | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ketersediaan Angkutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Umum untuk Jasa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Angkutan Orang | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan/atau Barang Antar | | | | | | | | | | |

| | 1 | | 1 | 1 | | T | I | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
|---|----|----|---|----|----|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|------------|------------|--------|--|
| | | | | | | Kota dalam 1 (satu) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 14 | | | garaan Angkutan Orang dalam | - | as | 29.907.360 | PWK | | - | 29.907.360 | 0% | |
| | | | | | | | alam 1 (satu) Daerah Kabupat | _ | , | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 14 | 01 | Fasilitas Pemenuhan | Jumlah Fasilitas | PWK | Keg | 29.907.360 | PWK | Keg | - | 29.907.360 | 0% | |
| | | | | | | Persyaratan Perolehan | Pemenuhan Persyaratan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Izin Penyelenggaraan | Perolehan Izin | | | | | | | | | |
| | | | | | | Angkutan Orang dalam | Penyelenggaraan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Trayek Kewenangan | Angkutan Orang dalam | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dalam | Trayek Kewenangan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sistem Pelayanan | Kabupaten/Kota dalam | | | | | | | | | |
| | | | | | | Perizinan Berusaha | Sistem Pelayanan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terintegrasi secara | Perizinan Berusaha | | | | | | | | | |
| | | | | | | Elektronik | Terintegrasi secara | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elektronik | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN | PELAYANAN | | | 100.001.200 | PWK | | 35.251.200 | 64.750.000 | 64,75% | |
| 2 | 15 | 03 | 2 | 06 | | Penetapan Lintas Penyebe | rangan dan Persetujuan Pengo | perasian Ka | pal | 100.001.200 | PWK | | 35.251.200 | 64.750.000 | 64,75% | |
| | | | | | | dalam Daerah Kabupaten/ | Kota yang terletak padaJaring | an Jalan | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dan/atau | Jaringan Jalan Kereta Api Kab | upaten/Kota | 1 | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Data dan | Jumlah Dokumen Data | PWK | 1 | 50.000.000 | PWK | Dok | - | 50.000.000 | 0% | |
| | | | | | | Informasi Jaringan Lintas | ASDP | | Dok | | | | | | | |
| | | | | | | Penyeberangan dan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persetujuan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengoperasian Kapal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dalam Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota yang | | | | | | | | | | |
| | | | | | | terletak pada Jaringan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan/atau Jaringan Jalur | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kereta Api | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dalam | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2 | 06 | 02 | Pengendalian dan | Jumlah kegiatan | PWK | Keg | 50.001.200 | PWK | Keg | 35.251.200 | 14.750.000 | 29,50% | |
| | | | | | | Pengawasan Jaringan | Pengendalian dan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Lintas Penyeberangan | Pengawasan Jaringan | | | | | | | | | |
| | | | | | | dan Persetujuan | Lintas Penyeberangan dan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengoperasian Kapal | Persetujuan | | | | | | | | | |
| | | | | | | dalam Daerah | Pengoperasian Kapal | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota yang | dalam Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | terletak pada Jaringan | Kabupaten/Kota yang | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jalan Kabupaten/Kota | terletak pada Jaringan | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Ī | | | dan/atau Jaringan Jalur | Jalan Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | | Kereta Api | dan/atau Jaringan Jalur | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota dalam | Kereta Api | | | | | |
| | | | Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota dalam | | | | | |
| | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 193 Tahun 2022 Dinas Perhubungan menyusun Program dan Kegiatan untuk Parsial Rencana Kerja yang terdiri dari 3 Program dan 19 Kegiatan 45 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.630.625.498,- dengan rincian indikasi Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - c. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
- g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
- h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Pengelolaan Pelayaran
 - a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Program dan Kegiatan dengan anggaran pada perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1MATRIKS RENCANA KERJA PARSIAL 2 DAN 3 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

| | | k | ODE | | | PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA | INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA | API | BD MURN | l (sesuai DPA) | PERU | BAHAN TAHUN 2022 | SELISIH | 1 | PERANG KAT DAERAH |
|---|----|----|-----|----|----|--|--|--------|---------|----------------|--------|---------------------|----------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | TAN | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif | % | DALIVAII |
| | | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(6-8) | 10 | 11 |
| 2 | 15 | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 20.630.625.498 | | 21.734.025.498 | 1.103.400.000 | 5,077% | DINAS |
| 2 | 15 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUS KABUPATEN/KOTA | SAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 18.060.312.818 | | 18.463.712.818 | 403.400.000 | 2,184% | PERHUB UNGAN |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran | dan Evaluasi Kinerja Perangkat D | aerah | | 29.759.900 | | 29.759.900 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun | PWK | 100% | 10.068.600 | 100% | 10.068.600 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen yang disusun | PWK | 100% | 10.553.000 | 100% | 10.553.000 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Keuangan Perangakat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun | PWK | 100% | 9.138.300 | 100% | 9.138.300 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Peran | gkat Daerah | | | 10.790.426.753 | | 10.790.426.753 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN | PWK | 100% | 10.780.325.153 | 100% | 10.780.325.153 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia | PWK | 100% | 10.101.600 | 100% | 10.101.600 | 0 | 0% | |
| 2 | | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Da | · | | | 10.450.950 | | 10.450.950 | 0 | 0% | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | PWK | 100% | 10.450.950 | 100% | 10.450.950- | 0 | 0% | |
| 2 | | 01 | 2 | 04 | | Administrasi Pendapatan Dae | rah Kewenangan Perangkat Dae | rah | | 125.000.000 | | 125.000.000 | 0 | 0% |] |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan | Jumlah Dokumen Kebijakan Retribusi | PWK | 100% | 125.000.000 | 100% | 125.000.000- | 0 | 0% | |

| | | ı | | | | Detailered Describ | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|------------------------------|--------------------------------|--------|------|---------------|------|---------------|-------------|--------|
| _ | | | _ | | | Retribusi Daerah | <u> </u> | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Po | | | | 74.850.000 | | 74.850.000 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | 01 | Peningkatan Sarana dan | Jumlah peningkatan sarana | PWK | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | - | 0% |
| | | | | | | Prasarana Disiplin Pegawai | dan prasarana disiplin | | | | | | | |
| | | | | | | | pegawai | | | | | | _ | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan | Jumlah kegiatan Koordinasi | PWK | 100% | 14.850.000 | 100% | 14.850.000- | 0 | 0% |
| | | | | | | Sistem Informasi | dan Pelaksanaan Sistem | | | | | | | |
| | | | | | | Kepegawaian | Informasi Kepegawaian | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pakaian Dinas Beserta | PWK | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000- | 0 | 0% |
| | | | | | | Pegawai Berdasarkan Tugas | Atribut Kelengkapan tersedia | | | | | | | |
| | | | | | | dan Fungsi | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangk | | | | 1.218.767.239 | | 1.395.417.239 | 176.650.000 | 12.66% |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen | Tersedianya komponen | PWK | 100% | 52.140.450 | 100% | 52.140.450 | 0 | 0% |
| | | | | | | Instalasi Listrik/Penerangan | instalasi listrik | | | | | | | |
| | | | | | | Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan | Tersedianya peralatan dan | PWK | 100% | 148.900.000 | 100% | 148.900.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Perlengkapan Kantor | perlengkapan kantor | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan | Tersedianya peralatan rumah | PWK | 100% | 50.969.450 | 100% | 50.969.450 | 0 | 0% |
| | | | | | | Rumah Tangga | tangga | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik | Tersedianya bahan logistik | PWK | 100% | 480.398.419 | 100% | 657.048.419 | 176.650.000 | 26,89% |
| | | | | | | Kantor | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan | Tersedianya bahan cetakan | PWK | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | dan Penggandaan | pengandaan | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan | Penyediaan Bahan Bacaan | PWK | 100% | 24.989.720 | 100% | 24.989.720 | 0 | 0% |
| | | | | | | dan Peraturan Perundang- | dan Peraturan Perundang- | | | | | | | |
| | | | | | | undangan | undangan | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat | Rapat-rapat koordinasi dan | PWK | 100% | 161.374.000 | 100% | 161.374.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Koordinasi dan Konsultasi | keluar daerah | | | | | | | |
| | | | | | | SKPD | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan | Jumlah menu/fitur sistem | PWK | 100% | 200.000.200 | 100% | 200.000.200 | 0 | 0% |
| | | | | | | Sistem Pemerintahan | , | | | | | | | |
| | | | | | | Berbasis Elektronik pada | | | | | | | | |
| | | | | | | SKPD | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 07 | | - | rah Penunjang Urusan Perangkat | Daerah | | 387.795.000 | | 387.120.000 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan | Tersedianya peralatan dan | Purw | 100% | 387.795.000 | 100% | 387.120.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Mesin Lainnya | mesin lainnya | akart | | | | | | |
| | | | | | | <i>'</i> | <i>'</i> | а | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang l | Jrusan Pemerintahan Daerah | • | | 5.041.212.976 | | 5.267.962.976 | 0 | 104% |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat | Tersedianya jasa surat | PWK | 100% | 2.000.000 | 100% | 2.000.000 | 0 | 0% |

| | | | 1 | | | Menyurat | manuurat | | | | | | | |
|----------|----|----|---|-----|----|-----------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|-------|---------------|-------------|---------|
| <u> </u> | 45 | 01 | _ | -00 | 00 | | menyurat | DVA/I/ | 4.000/ | 427 205 000 | 1000/ | 254.055.000 | 226 750 000 | C4 O40/ |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa | Tersedianya jasa komunikasi, | PWK | 100% | 127.305.000 | 100% | 354.055.000 | 226.750.000 | 64,04% |
| | | | | | | Komunikasi, Sumber Daya | sumber daya air dan listrik | | | | | | | |
| | | | _ | | | Air dan Listrik | <u> </u> | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Gaji tenaga harian lepas, PTT, | PWK | 100% | 4.911.907.976 | 100% | 4.911.907.976 | 0 | 0% |
| | | | | | | Umum Kantor | penjaga malam, pembantu | | | | | | | |
| | | | | | | | penguji dan premi asuransi | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik | Daerah Penunjang Urusan Pemeri | ntahan D | aerah | 382.050.000 | | 382.050.000 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa | Jumlah jasa pemeliharaan, | PWK | 100% | 91.500.000 | 100% | 91.500.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Pemeliharaan, Biaya | biaya pemeliharaan dan pajak | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan dan Pajak | kendaraan perorangan dinas | | | | | | | |
| | | | | | | Kendaraan Perorangan | atau dinas jabatan | | | | | | | |
| | | | | | | Dinas atau Kendaraan Dinas | | | | | | | | |
| | | | | | | Jabatan | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa | Tersedianya jasa | PWK | 100% | 237.800.000 | 100% | 237.800.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Pemeliharaan, Biaya | pemeliharaan, biaya | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan, Pajak dan | pemeliharaan, pajak dan | | | | | | | |
| | | | | | | Perizinan Kendaraan Dinas | perizinan kendaraan dinas | | | | | | | |
| | | | | | | Operasional atau Lapangan | operasional atau lapangan | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan | Terpeliharanya peralatan dan | PWK | 100% | 52.750.000 | 100% | 52.750.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Mesin Lainnya | mesin lainnya | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGAR | AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA | N (LLAJ) | | 2.470.311.480 | | 3.170.311.480 | 700.000.000 | 22,08% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | | Penyediaan Perlengkapan Ja | alan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 489.166.750 | | 489.166.750 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan | Tersedianya perlengkapan | PWK | 100% | 382.667.750 | 100% | 382.667.750 | 0 | 0% |
| | | | | | | Jalan di Jalan | jalan di jalan kabupaten/kota | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | 04 | Rehabillitasi dan | Jumlah rehabilitasi dan | PWK | 100% | 106.499.000 | 100% | 106.499.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | Pemeliharaan Perlengkapan | pemeliharaan perlengkapan | | | | | | | |
| | | | | | | Jalan | jalan | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 03 | | Pengelola Terminal Penump | , | 1 | | 93.695.650 | | 93.555.650 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 03 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM | Jumlah perserta peningkatan | PWK | 100% | 93.695.650 | 100% | 93.695.650 | 0 | 0% |
| | | | | | | Pengelola Terminal Tipe C | kapasitas SDM pengelola | | | | | 0011001100 | _ | • , . |
| | | | | | | | terminal Tipe C | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | | Penerbitan Izin Penvelengga | raan dan Pembangunan Fasilitas | Parkir | 1 | 130.030.100 | | 94.961.250 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | 01 | Fasilitas Pemenuhan | Jumlah sarana dan prasarana | PWK | 100% | 54.999.350 | 100% | 54.999.350 | 0 | 0% |
| _ | | | - | • | | Persyaratan Perolehan Izin | pengujian berkala kendaraan | | | 2 | 200,0 | 3555.550 | · · | 3,5 |
| | | | | | | Penyelenggaraan dan | bermotor tersedia | | | | | | | |
| | | | | | | Pembangunan Fasilitas | Definition terseard | | | | | | | |
| | | | | | | Parkir Kewenangan | | | | | | | | |
| | | | | | | raikii kewellaligali | | | | | | | | |

| | 1 | 1 | | ı ——— | ı | 1 1 | | | | | | | 1 | 1 | |
|---|----|----|---|-------|----|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-------------|------|---------------|-------------|--------|
| | | | | | | | Kabupaten/Kota dalam | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sistem Pelayanan Perizinan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Berusaha Terintegritas | | | | | | | | |
| | | | | | | | secara Elektronik | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | 02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah kegiatan peningkatan | PWK | 100% | 75.030.750 | 100% | 75.030.750 | 0 | 0% |
| | | | | | | | Pengawasan Pelayanan Izin | kapasitas sumber daya | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan dan | manusia pengujian berkala | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan Fasilitas | kendaraan bermotor | | | | | | | |
| | | | | | | | Parkir Kewenangan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | | | Pengujian Berkala Kendaraan | Bermotor | | | 555.999.350 | | 555.999.350 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | 01 | | Penyediaan Sarana dan | Jumlah kendaraan uji KIR | PWK | 100% | 260.095.950 | 100% | 260.095.950 | 0 | 0% |
| | | | | | | | Prasarana Pengujian Berkala | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Bermotor | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | 04 | | Penyediaan Bukti Uji | Tersedianya bukti lulus uji | PWK | 100% | 200.823.650 | 100% | 200.823.650 | 0 | 0% |
| | | | | | | | Pengujian Berkala | pengujian berkala kendaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Bermotor | bermotor | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | 07 | | Pemeliharaan Sarana dan | Terpeliharanya alat uji | PWK | 100% | 95.079.750 | 100% | 95.079.750 | 0 | 0% |
| | | | | | | | Prasarana Pengujian Berkala | kendaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Bermotor | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | | | Pelaksanaan Manajemen dan | Rekayasa Lalu Lintas untuk Jarii | ngan Jala | n | 896.485.950 | | 1.296.485.950 | 400.000.000 | 30,85% |
| | | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 01 | | Penataan Manajemen dan | Jumlah kegiatan penataan | PWK | 100% | 50.020.400 | 100% | 50.020.400 | 0 | 0% |
| | | | | | | | Rekayasa Lalu Lintas untuk | manajemen dan rekayasa lalu | | | | | | | |
| | | | | | | | Jaringan Jalan | lintas untuk jaringan jalan | | | | | | | |
| | | | | | | | Kabupaten/Kota | kabupaten/kota | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 04 | | Pengawasan dan | Jumlah kegiatan pengawasan | PWK | 100% | 796.512.250 | 100% | 1.196.512.250 | 400.000.000 | 33,43% |
| | | | | | | | Pengendalian Efektivitas | dan pengendalian efektivitas | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan | pelaksanaan kebijakan untuk | | | | | | | |
| | | | | | | | untuk Jalan Kabupaten/Kota | jalan kabupaten/kota | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 05 | | Forum Lalu Lintas dan | Jumlah kegiatan forum lalu | PWK | 100% | 49.953.300 | 100% | 49.953.300 | 0 | 0% |
| | | | | | | | Angkutan Jalan | lintas dan angkutan jalan | | | | | | | |
| | | | | | | | Kabupaten/Kota | kabupaten/kota | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | | | Persetujuan Hasil Analisa Dan | npak Lalu Lintas (Andalalin) untu | ık Jalan | | 99.999.600 | | 399.999.600 | 300.000.000 | 75% |
| | | | | | | | Kabupaten/Kota | • | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | 03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Penerbitan | PWK | 100% | 56.933.200 | 100% | 356.933.200 | 300.000.000 | 84,04% |
| | | | | | | | Penilaian Hasil Andalalin | Rekomendasi Andalalin | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | 04 | | Pengawasan Pelaksanaan | Jumlah Kegiatan Pengawasan | PWK | 100% | 43.066.400 | 100% | 43.066.400 | 0 | 0% |
| 1 | 1 | 1 | | I | 1 | | Rekomendasi Andalalin | Pelaksanaan Rekomendasi | | | | | | | |

| | | | ı | 1 | I | 1 | A made leding | | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | I | |
|---|-----|----|---|----|----|---------------------------------------|--|-----------|----------|-------------|-------|-------------|---|-----|
| _ | ļ | 62 | _ | - | - | Andre den to 1.12 | Andalalin | | | 74.000.400 | | 74 006 422 | | 001 |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 08 | | Audit dan Inspeksi Keselama | | T | | 74.996.120 | | 74.996.120 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 08 | 02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit | Jumlah kegiatan Pelaksanaan | PWK | 100% | 24.992.000 | 100% | 24.992.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | dan Pemantauan Unit | Inspeksi, Audit dan | | | | | | | |
| | | | | | | Pelaksana Uji Berkala | Pemantauan Unit Pelaksana | | | | | | | |
| | | | | | | Kendaraan Bermotor | Uji Berkala Kendaraan | | | | | | | |
| _ | 4.5 | 02 | _ | 00 | 02 | Dalahaanan kanadai Audit | Bermotor | DIAW | 4000/ | 25.040.400 | 1000/ | 25 040 400 | 0 | 00/ |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 08 | 03 | Pelaksanan Inspeksi, Audit | Jumlah Kegiatan Pelaksanan | PWK | 100% | 25.019.400 | 100% | 25.019.400 | 0 | 0% |
| | | | | | | dan Pemantauan Terminal | Inspeksi, Audit dan | | | | | | | |
| _ | 15 | 02 | 2 | 08 | ΟF | Deleterane propolei Audit | Pemantauan Terminal | PWK | 1000/ | 24 004 720 | 100% | 24.984.720 | 0 | 0% |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 08 | 05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan | PVVK | 100% | 24.984.720 | 100% | 24.984.720 | U | 0% |
| | | | | | | dan Pemantauan Sistem | Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem | | | | | | | |
| | | | | | | Manajemen Keselamatan Perusahaan Umum | Manajemen Keselamatan | | | | | | | |
| | | | | | | Perusanaan omum | Perusahaan Umum | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | | Ponyadiaan Angkutan Umur | n untuk Jasa Angkutan Orang dan | /atau Ba | rang | 100.030.600 | | 100.030.600 | 0 | 0% |
| | 13 | 02 | _ | 03 | | Antar Kota dalam 1 (satu) D | • | ijalau ba | lalig | 100.030.000 | | 100.030.000 | 0 | 0/8 |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Angkutan | Program simaskot | PWK | 100% | 25.030.600 | 100% | 25.030.600 | 0 | 0% |
| _ | 13 | 02 | _ | 03 | 01 | Umum untuk Jasa Angkutan | Flogram simaskot | FVVK | 100% | 23.030.000 | 100% | 25.030.000 | 0 | 070 |
| | | | | | | Orang dan/atau Barang | | | | | | | | |
| | | | | | | Antar Kota dalam 1 (satu) | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | 02 | Pengendalian dan | Rasio fasilitas penerbitan izin | PWK | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 0 | 0% |
| _ | | 0_ | - | | 0_ | Pengawasan Ketersediaan | trayek | | 10070 | 75.000.000 | 20070 | 75.000.000 | | 0,0 |
| | | | | | | Angkutan Umum untuk Jasa | , | | | | | | | |
| | | | | | | Angkutan Orang dan/atau | | | | | | | | |
| | | | | | | Barang Antar Kota dalam 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 14 | | Penertiban Izin Penyelengga | raan Angkutan Orang dalam Tray | ek Lintas | Daerah | 29.907.360 | | 29.907.360- | 0 | 0% |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dalam 1 (sa | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 14 | 01 | Fasilitas Pemenuhan | Jumlah Fasilitas Pemenuhan | PWK | 100% | 29.907.360 | 100% | 29.907.360 | 0 | 0% |
| | | | | | | Persyaratan Perolehan Izin | Persyaratan Perolehan Izin | | | | | | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Angkutan | Penyelenggaraan Angkutan | | | | | | | |
| | | | | | | Orang dalam Trayek | Orang dalam Trayek | | | | | | | |
| | | | | | | Kewenangan | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dalam | dalam Sistem Pelayanan | | | | | | | |
| | | | | | | Sistem Pelayanan Perizinan | Perizinan Berusaha | | | | | | | |
| | | | | | | Berusaha Terintegrasi | Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | |
| | | | | | | secara Elektronik | | | | | | | | |

| 2 | 15 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PE | | 100.001.200 | | 100.001.200 | 0 | 0% | | |
|---|----|----|---|----|----|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| 2 | 15 | 03 | 2 | 06 | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam | | | 100.001.200 | | 100.001.200 | 0 | 0% | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota yang | g terletak padaJaringan Jalan Kal | oupaten/ | Kota | | | | | |
| | | | | | | dan/atau Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Data dan | Jumlah Dokumen Data ASDP | PWK | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000- | 0 | 0% |
| | | | | | | Informasi Jaringan Lintas | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyeberangan dan | | | | | | | | |
| | | | | | | Persetujuan Pengoperasian | | | | | | | | |
| | | | | | | Kapal dalam Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota yang | | | | | | | | |
| | | | | | | terletak pada Jaringan Jalan | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dan/atau | | | | | | | | |
| | | | | | | Jaringan Jalur Kereta Api | | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dalam | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2 | 06 | 02 | Pengendalian dan | Jumlah kegiatan | PWK | 100% | 50.001.200 | 100% | 50.001.200 | 0 | 0% |
| | | | | | | Pengawasan Jaringan Lintas | Pengendalian dan | | | | | | | |
| | | | | | | Penyeberangan dan | Pengawasan Jaringan Lintas | | | | | | | |
| | | | | | | Persetujuan Pengoperasian | Penyeberangan dan | | | | | | | |
| | | | | | | Kapal dalam Daerah | Persetujuan Pengoperasian | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota yang | Kapal dalam Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | terletak pada Jaringan Jalan | Kabupaten/Kota yang | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dan/atau | terletak pada Jaringan Jalan | | | | | | | |
| | | | | | | Jaringan Jalur Kereta Api | Kabupaten/Kota dan/atau | | | | | | | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dalam | Jaringan Jalur Kereta Api | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota dalam | | | | | | | |
| | | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renja Parsial 2 dan 3 Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Murni Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Parsial Renja ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat di Dinas Perhubungan.

Dokumen Rencana Kerja Parsial Tahun 2022 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Semoga Rencana Kerja Parsial Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepeda seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen ini.

DINAS PERHUBUNGAN

PWAKE

Purwakarta, September 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN AH KABUPATEN PURWAKARTA

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM NIP.19720228 200312 1 003